



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG- UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

PANMUNJOM DECLARATION AND KOREAN PEACE PROSPECTS IN MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN ERA

Indriana Kartini

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)
Email: indriana.kartini@gmail.com

Diterima: 20 April 2018; direvisi: 2 Mei 2018; disetujui: 27 Juni 2018

Abstract

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords : *Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un*

Abstrak

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata Kunci : Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

Pendahuluan

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan pemimpin Korea Selatan, Presiden Moon Jae-in menandatangani Deklarasi Panmunjom Pada 27 April 2018, dalam pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea (*Inter-Korean Summit Meeting*) pada 27 April 2018. Peristiwa ini merupakan momentum sejarah yang merefleksikan aspirasi yang tak kunjung padam dari rakyat Korea bagi terciptanya perdamaian, kesejahteraan dan unifikasi di Semenanjung Korea yang secara teknis masih dalam kondisi perang. Kedua pemimpin negara mendeklarasikan dihadapan 80 juta rakyat Korea dan publik dunia bahwa tidak akan ada perang di Semenanjung Korea sekaligus menegaskan bahwa momen ini menandai era baru perdamaian.

Namun demikian, berdasarkan pengalaman pertemuan-pertemuan bilateral dua Korea sebelumnya, tidak sedikit yang meragukan bahwa perjanjian Panmunjom akan membawa perubahan yang berarti di Semenanjung Korea, termasuk bagaimana perjanjian ini berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implikasi dari Deklarasi Panmunjom dan prospek perdamaian dan unifikasi Korea, akan diulas mengenai upaya-upaya membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea sebelum Deklarasi Panmunjom.

Pendekatan Antar-Korea dalam Rangka Membangun Rezim Perdamaian

Meskipun enam puluh tahun telah berlalu sejak dua pemerintahan Korea didirikan pada 1948, Semenanjung Korea masih terbagi antara Republic of Korea (ROK/ Korea Selatan) dan the Democratic People's Republic of Korea (DPRK, atau Korea Utara). Hubungan antar-Korea masih dikarakteristikan dengan rasa saling tidak percaya, kebencian, kurangnya kerjasama, dan konflik ideologi. Nuansa Perang Dingin masih terasa di Semenanjung Korea.

Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama antar-Korea yang dihadiri oleh Presiden Korsel Kim Dae-Jung dan Pemimpin Korut Kim Jong-il, di Pyongyang pada 13-15 Juni 2000 juga menjadi salah satu momentum bersejarah. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi bersama antar-Korea pada 15 Juni 2000, yang menghasilkan kerangka kerja bagi institusionalisasi koeksistensi damai antara dua negara Korea. Keputusan Pemimpin Korut Kim Jong-il untuk menghadiri pertemuan tersebut merupakan simbolisasi perubahan kebijakan strategisnya terhadap Korsel. Proses perdamaian baru antar-Korea terus dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan saling memahami dalam rangka menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengelola proses perdamaian antar-Korea dengan melakukan transformasi Pyongyang dan mengontrol agar Korut tidak mengalami kejatuhan?. Dalam konteks ini, Seoul dapat berperan dalam dua skenario, yakni “crash landing” atau “soft landing”. “Crash landing” Korut atau kejatuhan dari dalam secara tiba-tiba, tidak diinginkan oleh Korsel karena beberapa alasan. Seoul tidak memiliki kapabilitas ekonomi untuk menyerap kejatuhan Korut. Mengingat perekonomian Korsel mengalami kemunduran beberapa tahun kebelakang, maka unifikasi Korea, jika mengikuti model unifikasi Jerman, akan memberikan pukulan telak bagi perekonomian Korsel, dan Seoul bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya di tahun-tahun mendatang. Selain itu, rakyat Korsel tidak akan mampu menerima kehilangan kemajuan ekonomi sebagai akibat unifikasi nasional secara cepat.

Jika situasi ekonomi Korut menurun, kelaparan semakin menyebar, dan isolasi internasional semakin dalam, maka pemimpin Korut akan berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menciptakan krisis militer di Semenanjung Korea. Jika situasi ini terjadi, maka ketegangan di Korea dan Asia Timur akan meningkat. Kebijakan keras dari Seoul terhadap Pyongyang akan memperkuat posisi garis keras Pyongyang dan hal ini bisa mengakibatkan perang terbuka. Instabilitas politik Korea Utara, kemiskinan, dan kerusakan sosial akan menyebabkan kejatuhan Korut.

Oleh karena itu, Seoul berkepentingan untuk membantu Pyongyang dalam memajukan situasi ekonominya dan membantu Pyongyang bergabung dengan komunitas internasional sebagai anggota penuh.

Skenario “soft landing” Korut atau mengadopsi ekonomi pasar dan demokrasi liberal secara gradual sangat diinginkan Korsel dan memungkinkan terjadi. Korea Utara berupaya untuk mengimplementasikan reformasi ekonomi yang kalkulatif dan *open-door policy*, mengikuti model Cina, untuk menyembuhkan penyakit kronis ekonominya dan mengakhiri isolasi diplomatik. Perubahan ekonomi dan *open-door policy*, meskipun terbatas, akan menjadi langkah awal transformasi rezim Stalinis Korut. Jika struktur ekonomi mulai berubah di bawah pengaruh kebijakan ekonomi berorientasi pasar dan meningkatnya kontak dengan dunia luar, maka struktur sosial dan politik juga akan berubah. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa untuk menciptakan unifikasi Korea yang damai adalah melalui rekonsiliasi antar-Korea dan kerjasama ekonomi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana mewujudkan skenario “soft landing” bagi Korut. Cara terbaik adalah dengan mendorong Korsel untuk meningkatkan aktivitas ekonominya dengan Korut dan membantu Korut menjadi anggota penuh komunitas internasional. Pyongyang akan melibatkan diri dalam dialog yang berarti dengan Seoul jika statusnya di komunitas internasional mengalami kemajuan dan situasi ekonominya stabil.

Untuk membantu Korut mencapai skenario “soft landing”, pada 1998, pemerintahan Korsel pimpinan Kim Dae-jung mengeluarkan kebijakan “sunshine policy” terhadap Korut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dengan mempromosikan rekonsiliasi, kerjasama dan perdamaian. Kebijakan ini mengasumsikan bahwa lebih penting untuk menciptakan koeksistensi damai (*peaceful coexistence*) antara dua Korea ketimbang mendorong unifikasi secepatnya. Terdapat dua tujuan dari *sunshine policy*, yakni: 1) manajemen damai dalam pemisahan bangsa dan 2) promosi lingkungan yang nyaman bagi Korut untuk berubah dan membuka diri

tanpa diliputi rasa takut. Pemerintah Korsel menginginkan untuk mengurangi ketegangan dan menegosiasikan kontrol senjata dengan Korut dalam konteks melakukan deterensi guna mencegah terjadinya perang terbuka di semenanjung. Selain itu, untuk mendorong Korut melakukan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi sistem ekonomi berorientasi pasar.¹

Terdapat tiga prinsip dasar Sunshine Policy, antara lain: *Pertama*, Korsel tidak akan menolerir setiap provokasi militer Korut. Korsel akan mempertahankan postur keamanan yang kuat terhadap Korut dan akan merespons langsung setiap provokasi. Di saat yang sama, Korsel akan terus melakukan upaya mengurangi ketegangan dan membangun rasa saling percaya diri. *Kedua*, Korsel akan berupaya melibatkan Korut. Ketimbang mempromosikan kejatuhan Korut, Korsel berniat untuk menciptakan *peaceful coexistence* dan lingkungan yang nyaman bagi terciptanya komunitas nasional Utara-Selatan yang secara bertahap ke depannya akan terwujud unifikasi damai. *Ketiga*, rekonsiliasi dan kerjasama antar-Korea akan diperluas. Pemerintah Korsel akan melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi permusuhan yang terjadi antara dua Korea sejak pemisahan Semenanjung Korea. Pihak Korsel ingin mengimplementasikan *Inter-Korean Basic Agreement on Reconciliation, Nonaggression, and Exchanges and Cooperation* yang ditandatangani pada 1991 antara Korsel dan Korut.²

Dengan menggunakan tiga prinsip dasar tersebut, pemerintah Seoul mengadopsi enam panduan untuk mengimplementasikan kebijakan Korsel yang baru terhadap Korut, yakni: 1) keamanan nasional yang kuat dan kerjasama antar-Korea akan dipromosikan secara paralel; 2) promosi *peaceful coexistence* dan kerjasama antar-Korea akan menjadi prioritas utama; 3) lingkungan yang kondusif bagi terbukanya Korut dan menciptakan transformasi Korut; 4) kepentingan yang sama perlu dipromosikan; 5) prinsip hak menentukan nasib sendiri dan dukungan dari komunitas internasional harus

¹ Tae-Hwan Kwak & Seung-Ho Joo, “The Korean Peace Process: Problems and Prospects after the Summit”, *World Affairs*, Vol. 165, No.2 (Fall 2002), hlm. 80.

² *Ibid.*

didukung; 6) implementasi kebijakan Korut harus didasarkan pada konsensus nasional.³

Pemerintahan Kim Dae-jung menetapkan enam langkah untuk mengimplementasikan panduan kebijakannya, antara lain: menghidupkan kembali perjanjian dasar 1991 melalui dialog antar-Korea; pemisahan antara bisnis dari politik; reuni keluarga yang terpisah; fleksibilitas dalam menyediakan bantuan makanan bagi Korut; melanjutkan komitmen untuk proyek reaktor air; dan menciptakan lingkungan yang damai di Semenanjung Korea. Pemerintahan Kim Dae-jung juga secara konsisten mengimplementasikan *engagement policy* terhadap Korut sejak Februari 1998. Kebijakan tersebut bisa dikatakan cukup berhasil dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, *engagement policy* telah mencegah terjadinya perang terbuka di Semenanjung Korea dan berkontribusi pada lingkungan internasional dimana sistem Perang Dingin di semenanjung dapat dihilangkan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga berkontribusi pada pengelolaan permasalahan yang stabil terkait dengan pembekuan program nuklir Korut dan uji coba misil jarak jauhnya. *Kedua*, *engagement policy* berkontribusi pada pengurangan ketegangan dan penciptaan lingkungan yang nyaman untuk meningkatkan hubungan antar-Korea. Kerjasama ekonomi antar-Korea dan pertukaran di level non-pemerintah telah diperluas. Proyek wisata Mt. Gungang melambangkan langkah awal sejarah kerjasama antar-Korea. Lebih dari empat ratus ribu turis telah mengunjungi Mt. Gungang di Korut, sejak 18 November 1998. Perdagangan antar-Korea dimulai pada 1989 dengan keuntungan berkisar pada \$18 juta dan volumenya mencapai \$330 juta pada 1999. *Ketiga*, kebijakan pemerintah Korsel untuk mendorong olahraga antar-Korea, pertukaran anggota keluarga yang terpisah, dan pertukaran budaya antara Seoul dan Pyongyang, berkontribusi pada upaya lebih memahami antara rakyat Korsel dan Korut. *Engagement Policy* Korsel juga turut berkontribusi pada keputusan pemimpin Korut Kim Jong-il untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Korea Pertama pada 2000.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

Perkembangan Hubungan antar-Korea Pasca Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama

Bagian ini akan membahas kemajuan yang dicapai dalam hubungan antar-Korea pasca Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama, khususnya dalam hal proses perdamaian, pembentukan rasa percaya diri bersama dan kerjasama antar-Korea.

Reuni Anggota Keluarga yang Terpisah

Resolusi untuk persoalan keluarga yang terpisah merupakan prioritas utama bagi pemerintah Seoul karena hal ini merupakan isu HAM yang fundamental. Isu ini juga memiliki simbol penting bagi rekonsiliasi dan kerjasama antar-Korea. Pemimpin Korut Kim Jong-il menerima proposal Korsel dan dalam kesempatan yang sama mengajukan proposal tandingan. Kim Jong-il menginginkan dikembalikannya mata-mata dan simpatisan Korut yang telah dibebaskan setelah dihukum penjara, namun menolak menjadi warga negara Korsel karena alasan ideologis. Pihak Korsel kemudian menerima proposal tersebut dalam kerangka kemanusiaan. Langkah tersebut diambil Korsel karena termotivasi oleh keinginan untuk menyelesaikan isu-isu lainnya, seperti pemulangan nelayan Korsel yang diculik dan tahanan Perang Korea yang masih dipenjara di Korut.

Sejak Pertemuan Tingkat Tinggi Juni 2000, telah dilakukan tiga kali reuni keluarga yang terpisah antara Korsel dan Korut. Di kesempatan yang sama, pemerintah Korsel telah mengembalikan delapan puluh tiga orang Komunis ke Korut. Namun demikian, Korut justru tertinggal dalam melakukan langkah pengembalian seperti yang dilakukan Korsel. Tidak ada kemajuan dalam pengembalian nelayan Korsel dan tahanan Perang Korea. Korut bahkan secara sepihak membatalkan reuni keempat yang dikadwalkan pada 16-18 Oktober 2000. Selanjutnya, Korut juga tidak memegang teguh perjanjian awal untuk membangun tempat permanen bagi reuni keluarga terpisah di dekat zona demiliterisasi (DMZ). Meskipun kedua pihak telah mengimplementasikan hasil perjanjian meski terbatas, namun kedua pihak masih belum merasa puas akan capaian tersebut (lihat tabel 1).

Tabel 1. Pertukaran Keluarga Terpisah

	Address checks	Exchanges of letter	Reunions in third countries	Exchange visit reunions
Jumlah	2073	2044	443	416
kasus	1239*	1023*	148*	410

*jumlah kasus di tahun 2000

Sumber: Ministry of Unification, Republic of Korea, (Peace and Cooperation, 2001), dikutip dari Chung-in Moon dan Tae-Hwan Kim, "Sustaining Inter-Korean Reconciliation: North-South Korea Cooperation", *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 15, No.2 (Fall/Winter 2001), hlm. 212.

Kerjasama Ekonomi antar-Korea

Pasca Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama, terjadi kerjasama ekonomi sekaligus pertukaran sosial dan budaya antar-Korea. Korsel meningkatkan bantuan ekonomi dan kemanusiaannya kepada Korut. Selain itu, Korsel juga memperluas tujuan kerjasama ekonomi dengan Korut dengan membangun jalur kereta Seoul-Shinuiju, serta meningkatkan bantuan pupuk dan makanan ke Korut. Lebih lanjut, pemerintah Korsel juga meningkatkan jumlah dana kerjasama Korut-Korsel lima kali lipat dari 172 milyar won di tahun 1999 hingga 634,5 milyar won di tahun 2011. Sementara itu, Korut telah menyetujui untuk mengakomodir permintaan Korsel terkait perubahan lembaga ekonomi Korut seperti pelembagaan jaminan investasi, mengadopsi standar global dalam resolusi pertikaian komersil, perlindungan terhadap swasta dan hak kepemilikan intelektual, serta pencegahan pajak ganda.⁵

Disamping upaya tersebut, tidak ada terobosan yang dilakukan dalam pertukaran dan kerjasama ekonomi antar-Korea. Pemerintah Korsel sejak awal bergantung pada kelompok Chaebol dalam mengambil langkah ekonomi dengan Korut, namun, hanya sedikit, seperti Hyundai, yang secara aktif mencari peluang ekonomi di Korut (Lihat tabel 2). Sementara perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok Chaebol seperti Samsung, SK, dan LG mengambil posisi *wait and see*, Hyundai, yang merupakan mesin penggerak utama kerjasama

ekonomi antar-Korea, mengalami permasalahan finansial.

Pertukaran Sosial, Budaya, dan Olahraga

Pasca perjanjian untuk mempromosikan kerjasama dan pertukaran di bidang sosial, budaya, olahraga, kesehatan publik, dan lingkungan, sekelompok eksekutif media dari Korsel mengunjungi Korut pada Agustus 2000 dan melakukan pertukaran protokol media. KBS dan SBS menayangkan secara langsung dari Mt. Baekdu dan Pyongyang. Surat kabar Hankyoreh dan MBC juga mengunjungi Korut.

Di bidang budaya, orkestra simfoni dari dua Korea melakukan konser bersama di Seoul pada Agustus 2000 dan film Korsel berjudul JSA (Joint Security Area) ditampilkan di Korut tiga bulan kemudian. Pertukaran budaya lainnya termasuk opera klasik Korsel tampil di Pyongyang pada Februari 2001 dan penyanyi pop Kim Yeon-ja tampil di Hamheung dua bulan kemudian. Kemudian, sejumlah 109 wisatawan Korsel mengunjungi Mt. Baekdu di Korut pada September 2000 dan sejumlah wisatawan Korut dijadwalkan mengunjungi Mt. Halla di Pulau Jeju, Korsel pada 2001. Lebih lanjut, beberapa pertandingan tenis persahabatan juga diadakan di Pyongyang dan rally motor internasional diadakan di Mt, Gungang, di bulan Juli 2000. Pada September 2000, dua tim Olimpiade dua Korea berjalan bersama pada upacara pembukaan Olimpiade Sydney di bawah bendera yang menggambarkan peta Semenanjung Korea yang bersatu. Selain itu, di bidang agama, perayaan Paskah dilaksanakan di Seoul yang dihadiri oleh warga Kristiani dari Selatan dan Utara, dua perayaan Buddha juga dilaksanakan secara simultan di dua ibukota Korea untuk merayakan Hari Kebebasan 15 Agustus dan perayaan bersama mengenang hari lahirnya Buddha diadakan pada 2001.

Deklarasi Panmunjom

Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Panmunjom, dua pemimpin Korea saling berkomitmen untuk mengakhiri konfrontasi warisan Perang Dingin yang telah berlangsung lama dan mulai membuka era baru bagi rekonsiliasi, perdamaian

⁵ Chung-in Moon dan Tae-Hwan Kim, "Sustaining Inter-Korean Reconciliation: North-South Korea Cooperation", *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 15, No.2 (Fall/Winter 2001), hlm. 211.

Tabel 2. Ekspansi Pertukaran dan Kerjasama Ekonomi Antar-Korea

Area	Progres
Institusionalisasi Kerjasama Ekonomi antar-Korea	Empat perjanjian Kerjasama Ekonomi Utara-Selatan (perlindungan investasi, pencegahan pajak ganda, prosedur untuk resolusi perselisihan komersial dan <i>clearing settlement</i>)
Rekoneksi Jalur Kereta Seoul-Shinuiju dan Jan Tol Munsan-Kaesung	Jalur Kereta: 57% selesai (bagian selatan) Jalan Tol : 36% selesai (bagian selatan)
Imijin River Basin Joint Flood Prevention	Working-level talks (Februari 2001)
Pembangunan Kawasan Industri Kaesung	Perundingan antara Korea Utara dan Hyundai mengenai Basic Law for International Free Economic Zone (Januari dan Februari 2001)
Perdagangan antar-Korea (2000)	7.394 kasus, 647 item Total volume \$425.148.000
Mt. Kumkang Tourism	Perjanjian antara Korea Utara dan Hyundai mengenai perluasan bisnis pariwisata (Mei 2001)
Kerjasama Energi Utara-Selatan	1st working level talks (Februari 2001)
Proyek Bersama di Sektor Manufaktur	Kerjasama antar-Korea di sektor ini telah melewati tahap mencari peluang bisnis dan telah memasuki produksi dan impor skala besar.
Proyek Bersama di Sektor Pertanian dan Perikanan	Proyek kerjasama bagi pengembangan varietas jagung baru oleh International Corn Foundation Proyek Tembakau Bersama oleh Korea Tobacco & Ginseng Corporation Produksi Peternakan oleh Hyundai Asan Kerjasama antar-Korea di sektor perikanan oleh Miheung Food dan National Federation of Fisheries Cooperatives

Sumber : Ministry of Unification, Republic of Korea, (Peace and Cooperation, 2001), dikutip dari Chung-in Moon dan Tae-Hwan Kim, "Sustaining Inter-Korean Reconciliation: North-South Korea Cooperation", *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 15, No.2 (Fall/Winter 2001), hlm. 214.

dan kesejahteraan, serta untuk meningkatkan hubungan baik antar Korea. Berikut beberapa poin penting dalam Deklarasi Panmunjom :

1. Denuklirisasi

Korea Selatan dan Korea Utara mengkonfirmasi tujuan utama untuk merealisasikan melalui program denuklirisasi secara lengkap, yakni terciptanya Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Korea Selatan dan Korea Utara saling memahami bahwa inisiasi yang dilakukan Korea Utara sangat berarti dan krusial bagi denuklirisasi Semenanjung Korea dan setuju untuk saling berperan dan bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Korea Utara dan Korea Selatan setuju untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari komunitas internasional bagi program denuklirisasi Semenanjung Korea.

2. Rezim Damai

Tahun 2018 sekaligus merupakan peringatan 65 tahun gencatan senjata. Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk melakukan pertemuan trilateral yang melibatkan dua Korea dan AS, atau pertemuan quadrilateral yang melibatkan dua Korea, AS, dan Cina untuk mendeklarasikan penghentian Perang, mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian perdamaian dan menciptakan rezim perdamaian yang permanen dan solid.

3. Kunjungan Pyongyang

Kedua pemimpin Korea setuju, melalui pertemuan reguler dan percakapan melalui sambungan telepon, untuk melakukan diskusi secara terus menerus mengenai isu-isu vital bangsa Korea, untuk memperkuat rasa saling percaya dan untuk memperkuat upaya bersama

dalam menciptakan momentum positif melalui peningkatan hubungan antar-Korea termasuk juga perdamaian, kemakmuran dan unifikasi Semenanjung Korea. Dalam konteks ini, Presiden Moon Jae-In setuju untuk mengunjungi Pyongyang di Musim Gugur 2018.

4. Reuni Keluarga

Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk bekerjasama dalam penyelesaian isu-isu kemanusiaan sebagai akibat dari pemisahan Korea dan untuk menyelenggarakan Pertemuan Palang Merah antar-Korea untuk mendiskusikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk reuni keluarga yang terpisah. Dalam konteks ini, Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk menindaklanjuti program reuni bagi keluarga yang terpisah dalam acara Perayaan Hari Kebebasan Nasional pada 15 Agustus 2018.

5. Bergabung dalam Kekuatan Olahraga

Di tingkat internasional, kedua belah pihak sepakat untuk menunjukkan kebaikan, talenta, dan solidaritas bersama dengan secara bersama-sama berpartisipasi dalam *event* olahraga internasional seperti Asian Games 2018.

6. Perlucutan Senjata

Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk melakukan perlucutan senjata secara bertahap, menghilangkan ketegangan militer dan mencapai kemajuan substansial dalam hal *military confidence-building*.

7. Tidak ada Perang

Kedua pemimpin negara mendeklarasikan dihadapan 80 juta bangsa Korea dan seluruh dunia bahwa tidak akan ada lagi perang di Semenanjung Korea dan dimulainya era baru perdamaian.

Bagi beberapa kalangan, Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom yang bersejarah antara Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un bukan hal yang mengejutkan dan merupakan pengulangan dari Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Korea sebelumnya yang dilaksanakan pada 2000 dan 2007. Namun demikian, ada pula

beberapa perbedaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi tahun 2018 dengan tahun 2000 dan 2007.

Pertama, dalam hal waktu pelaksanaan. Presiden Moon telah belajar dari pertemuan pendahulunya Roh Moo-Hyun dengan Kim Jong-il tahun 2007 yang dilaksanakan di akhir masa jabatan Presiden Korsel. Presiden Roh, pada akhirnya tidak dapat menyaksikan implementasi dari resolusi pertemuan tahun 2007. Sementara Presiden Moon, telah menyiapkan proses antar-Korea yang dapat diimplementasikan dalam kurun waktu empat tahun masa jabatannya. Pihak oposisi Moon mengkritisi bahwa mengingat perolehan suaranya dalam pemilu presiden 2017, Moon kurang memiliki mandat untuk mengimplementasikan kebijakannya dalam aksi nyata. Namun demikian, hasil survei opini publik yang dilakukan pasca Pertemuan Tingkat Tinggi April 2018 justru mematahkan kritik tersebut dan menunjukkan 90% warga Korsel mendukung Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom sekaligus mendukung langkah Presiden Moon. *Kedua*, dalam hal tingkat ancaman nuklir dan rudal balistik Korut yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam dua Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya, ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, tidak memiliki senjata yang cukup untuk mengancam AS dan dapat melemahkan aliansi AS-Korsel. Namun, dimasa Kim Jong-un, Korut memiliki persenjataan yang dapat digunakan untuk mengancam AS dan digambarkan olehnya sebagai “pedang keadilan yang bernilai”.⁶

Dalam hal denuklirisasi, kata ini muncul tiga kali dalam Deklarasi Panmunjom. Pihak Korut juga merilis versi bahasa Inggris dari deklarasi tersebut di media-media pemerintah yang juga menimbulkan kecurigaan akan adanya perbedaan interpretasi. Berdasarkan berita dalam bahasa Inggris yang dirilis pemerintah Korea Utara, diungkapkan bahwa Pyongyang menempatkan posisi mereka sebagai kekuatan senjata nuklir yang berkomitmen terhadap perlucutan senjata nuklir global. Bahkan beberapa hari sebelum

⁶ Ankit Panda, “Seeing Through the Familiarity of the-Inter-Korean Panmunjom Declaration”, <https://thediplomat.com/2018/05/seeing-through-the-familiarity-of-the-inter-korean-panmunjom-declaration/>, 7 Mei 2018, diakses pada 23 Mei 2018.

pertemuan antar-Korea, Kim Jong-un berjanji untuk menghentikan uji coba rudal balistik yang menjangkau antar benua serta menutup tempat uji nuklir di Punggye-ri.

Namun demikian, kesamaan dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya terlihat pada area denuklirisasi. Pertemuan Panmunjom dan deklarasi yang dihasilkannya bukanlah momen awal bagi prospek pemusnahan senjata masal baik dari Korea Utara maupun Semenanjung Korea.

Implikasi Deklarasi Panmunjom

Pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom muncul pertanyaan bagaimana implikasi deklarasi tersebut terhadap proses keamanan regional dan internasional? Dari situasi antagonisme beberapa bulan lalu hingga Pertemuan Tingkat Tinggi April 2018 antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, maka bisa dikatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian positif. Namun demikian, perjanjian tersebut perlu dievaluasi secara kritis dan bisa dibagi dalam tiga argumentasi. *Pertama*, argumen yang memandang bahwa perjanjian tersebut baik bagi moral bangsa Korea. *Kedua*, argumen yang memandang perjanjian tersebut akan membawa perubahan positif yang bertahan lama; dan ketiga, argumen yang memandang perjanjian tersebut bagus tapi kurang substansial.⁷

Bagi argumen pertama, Seoul dan Pyongyang telah menyetujui untuk melakukan reuni anggota keluarga yang terpisah pada Perang Korea, membangun kantor perwakilan di Kaesong, dan mengurangi aksi kekerasan di perbatasan. Sinyal ini dapat memperbaiki hubungan Utara-Selatan namun bisa tidak diselesaikan melalui perintah eksekutif jika terjadi pertikaian. Bagi argumen kedua, baik Korut dan Korsel berkomitmen untuk menciptakan perjanjian perdamaian sebagai pengganti konflik bersenjata dalam Perang Korea melalui konsultasi multilateral dengan Cina dan AS. Perjanjian ini dapat menjadi media perubahan di semenanjung yang

dapat mendorong Korut untuk bersikap baik dan secara tidak langsung menjamin keamanan rezim Kim Jong-un. Untuk argumen ketiga, penandatanganan deklarasi oleh Moon dan Kim pada Pertemuan Tingkat Tinggi menunjukkan komitmen Korut dan Korsel untuk menyelesaikan masalah denuklirisasi. Berdasarkan rekam jejak Pyoingyang yang tidak baik dalam mematuhi perjanjian perlucutan senjata nuklir, muncul sikap skeptis apakah Kim akan melucuti senjata Korut dan jika Kim pada akhirnya bersikeras untuk mempertahankan senjata nuklir Korut, maka semua kemajuan yang telah dicapai akan gugur.⁸

Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana perjanjian Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional? Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh Moon dan Kim pada 27 April 2018 dituangkan dalam poin-poin yang bersifat luas dan general. Secara fundamental, semangat rekonsiliasi nasional yang tercantum dalam Deklarasi Panmunjom, pada intinya sama dengan deklarasi yang dihasilkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya pada tahun 2000 dan 2007. Namun, ada beberapa bagian yang perlu digaribawahi dalam Deklarasi Panmunjom yakni pernyataan :”*both sides agreed to...fully implement all existing agreements and declarations adopted between the two sides thus far*”. Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa Pyongyang telah memperbarui komitmennya yang pernah dinyatakan dalam Deklarasi Bersama tahun 1992 tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea. Hal ini dapat digunakan dalam negosiasi nuklir di masa depan untuk mencegah delegasi Korut mengulur waktu perundingan.⁹

Subpoin lainnya yang penting ditegaskan dalam pernyataan bahwa “*South and North Korea agreed to carry out (conventional) disarmament in a phased manner, as military tension is alleviated and substantial progress is made in military confidence building*”. Dari *standpoint* keamanan nasional Korea Selatan, pernyataan ini dapat meresahkan mengingat kekuatan militer Korea Selatan, secara kuantitas, lebih inferior bila dibandingkan dengan kekuatan militer Korea Utara dan setiap upaya untuk mengurangi

⁷ Liang Tuang Nah, “How Much Do the Panmunjom Agreements Matter?”, 30 April 2018, <https://thediplomat.com/2018/04/how-much-do-the-panmunjom-agreements-matter>, diakses pada 20 Juli 2018.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

senjata militer akan memperlemah kekuatan militer Korsel dan justru menguntungkan Korut. Bagi Pyongyang, kebijakan “military first” atau “Songun policy” yang diluncurkan ayah Kim Jong-un, yakni Kim Jong-il, memunculkan sikap skeptis tentang keikhlasan pemimpin pendahulu Korut dalam mengurangi jumlah persenjataan militernya, termasuk jumlah pasukan, tank, dan artileri. Selain itu, pernyataan tersebut juga memerlukan syarat yang tinggi, sulit untuk diverifikasi, dan sulit direalisasikan. Terakhir, Deklarasi Panmunjom memperkuat perjanjian Moon untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi lainnya di Musim Gugur 2018 dimana hal ini memberikan kesempatan lima bulan stabilitas bagi Korsel mengingat Korut akan bersikap baik dalam jangka pendek. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan kepercayaan diri bagi kalangan bisnis di Korsel.¹⁰

Selain itu, dapat diasumsikan bahwa Kim Jong-un berupaya untuk mendapatkan hasil dari pencabutan sanksi, dan bahwa kegagalan untuk mencapai konsesi dalam jangka waktu tertentu akan berakibat pada kebijakan antagonistik Korut. Dalam hal ini, alangkah bijaknya jika Presiden Moon memberikan saran kepada Presiden AS Donald Trump untuk tidak meremehkan Kim Jong-un dan sebaiknya menawarkan perjanjian denuklirisasi yang adil. Selain itu, mengingat Moon akan bertemu kembali dengan Kim di musim gugur, Moon sebaiknya menawarkan Trump untuk berkomunikasi dan mendukung setiap proposal yang telah diperbarui dari AS kepada Korut, yang juga bagian dari pengamanan kepentingan nasional Korsel, sehingga proses denuklirisasi tidak gagal di tengah jalan.

Deterensi Stabil di Semenanjung Korea

Salah satu pertanyaan yang selama ini berkembang adalah mengapa tidak terjadi perang terbuka di semenanjung selama hampir enam puluh tahun? Jawabannya terletak pada deterensi yang stabil. Selama lebih dari enam puluh tahun Korea Utara tidak melakukan serangan militer di Semenanjung Korea karena adanya deterensi yang kuat. Menurut Bernard Brodie, deterensi merupakan strategi untuk mencegah musuh

mengambil tindakan yang belum dimulai dan deteren nuklir yang tepat harus selalu disiagakan dan tidak pernah digunakan.¹¹ Meskipun sering terjadi ketegangan di Semenanjung Korea, namun adanya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) mampu mencegah terjadinya perang terbuka. Selama lebih dari enam puluh tahun kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan operasi militer skala besar, atau berupaya menantang keseimbangan kekuatan yang telah stabil. Korea Selatan dan Korea Utara berada dalam situasi *zero-sum*, *winner-take-all*, dan *mutual hostage*. Kedua pihak saling menginginkan kekalahan di pihak lawan dan kedua pihak dapat menghancurkan yang lain.

Mengapa deterensi di Korea berhasil? Hal ini karena deterensi AS telah membuat serangan Korut tidak berarti. Analisis Korea seringkali mengabaikan faktor deterensi dan fokus pada tingkat kekerasan, terorisme, atau tindakan subversif yang dilakukan Korut. Bagaimana Semenanjung Korea dapat stabil ketika para akademisi, diplomat, dan politisi secara terus menerus menyebut Semenanjung Korea sebagai “tinderbox”? Alasan yang dikemukakan oleh para akademisi adalah mengapa mereka mengkhawatirkan Korea Utara dan sedikit mengemukakan tentang situasi dimana Korea Utara harus mengambil keputusan. Para analis berpendapat bahwa Korea Utara memulai perang Korea pada 1950 dan Korut telah melancarkan serangkaian serangan teroris dan karena itu dianggap sebagai negara agresif. Poin penting disini adalah perang skala besar bukan lagi pilihan Korut bahkan sejak pasca 1950. Penempatan pasukan AS di Korea Selatan membuat deterensi menjadi kuat dan peluang terjadinya perang di Semenanjung Korea semakin kecil. Korea Utara dengan berbagai langkah agresifnya terhadap Korsel tidak pernah secara langsung menantang keseimbangan kekuatan yang ada.¹²

¹¹ Bernard Brodie, *The Anatomy of Deterrence as found in Strategy in the Missile Age*, (Princeton: Princeton University Press, 1959), hlm. 264-304.

¹² David C. Kang, “International Relations Theory and the Second Korean War”, *International Studies Quarterly*, Vol.47, No.3 (Sep. 2003), hlm. 319.

¹⁰ *Ibid.*

Meskipun terjadi ketegangan tinggi di semenanjung, keberadaan militer Korut, baik sistem konvensional dan misil, dimaksudkan untuk menghalangi sepak terjang Korsel dan AS agar tidak terlalu “berpetualang” di Semenanjung Korea. Beberapa dekade yang diwarnai oleh sikap saling tidak percaya dan curiga antar kedua pihak menjadikan negosiasi dan komunikasi sulit dilakukan. Secara implisit dalam kebijakan luar negeri AS tahun 1990 adalah ekspektasi bahwa Korut akan terikat dengan perlucutan senjata unilateral. Kebijakan implisit AS ini menginginkan Korut meninggalkan program militernya dan jika dilakukan maka AS akan menentukan apakah akan bersikap bijak atau tidak terhadap Korut. Dari pespektif realis, tidak sulit untuk melihat mengapa Korut memiliki masalah dengan hal ini. Meskipun program misil Korut merupakan bagian dari strategi deterensi mereka, sumber utama dari deterensi melawan Korsel adalah artileri yang menjadi Korsel tersandera. Meskipun Korut ingin bergabung dengan komunitas bangsa, mereka tidak berniat untuk melepaskan kedaulatan mereka. Korut juga telah menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi terutama dalam hal program perlucutan senjata misilnya sebagai imbalan terkait upaya perbaikan keamanannya dengan Amerika Serikat (AS).¹³

Korea Utara bisa saja meluncurkan bom di kota Seoul atau Tokyo (atau Washington, D.C.) setiap minggu jika mereka mau. Namun, Korut tidak melakukan itu karena tujuan mereka adalah untuk bertahan, bukan bunuh diri atau perusakan secara acak. Dalam hal tuduhan sebagai “rogue states” dan rencana Korut untuk meluncurkan nuklir ke AS, terdapat tiga alasan dasar untuk meragukan ancaman ini. *Pertama*, Korut belum mengembangkan kapabilitas ini, namun baru dikhawatirkan mereka pada akhirnya akan melakukan hal itu. *Kedua*, merupakan bunuh diri bagi Korut, mengingat setiap serangan ke AS akan menghasilkan aksi balas dendam yang masif dari AS dan upaya Korut dalam beberapa dekade menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan kuat untuk bertahan. *Ketiga*, mengapa mengembangkan misil balistik yang mahal untuk menembak AS jika lebih mudah untuk menyelundupkan senjata nuklir ke AS? Oleh

karena itu penting untuk membedakan antara kapabilitas dan keinginan. Korut memiliki kapabilitas untuk meluncurkan bom ke kota-kota di Korsel dan Jepang, namun keinginan mereka adalah untuk bertahan, bukan meningkatkan ketegangan. Sementara itu, kepemilikan misil tidak akan memberikan kapabilitas teroris bagi Korut, namun pada kenyataannya, misil menyediakan deterensi militer.¹⁴

Dalam hubungannya dengan AS, baik Korut maupun AS sama-sama saling tidak mempercayai satu sama lain. Korut sangat paham bahwa tujuan utama AS adalah transformasi atau menghapus cara hidup mereka dan Korut memiliki alasan kuat untuk khawatir akan hal ini. Kesulitan muncul dalam hal bagaimana suatu negara mulai mempercayai negara lain. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tidak ada perang di Semenanjung Korea selama enam puluh tahun karena adanya deterensi yang stabil.

Manajemen Krisis di Semenanjung Korea

Sebelum pemerintahan Moon memulai kebijakan pendekatan terhadap Korea Utara dan kebijakan unifikasi, Korut terus meluncurkan misilnya, yang berujung pada diskusi mengenai pemberian sanksi yang lebih keras dari komunitas internasional, termasuk AS dan PBB. Jika krisis di Semenanjung Korea tidak dikelola dengan baik, visi kebijakan baru akan sulit diwujudkan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Presiden Moon, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengelola krisis di Semenanjung Korea yang dapat disebabkan oleh provokasi senjata nuklir Korut selanjutnya, peluncuran senjata strategis AS di semenanjung, dan reaksi militer Korut. Jika hal ini terjadi, Korsel harus mencegah provokasi Korut dan dilengkapi dengan postur militer yang siap melalui kombinasi kekuatan militer AS-Korsel, peningkatan kepercayaan terhadap deterensi AS, dan penempatan aset strategis AS di Semenanjung Korea.

Lebih lanjut, buku manual manajemen krisis harus dibuat kasus per kasus sebagai persiapan menghadapi provokasi dan ancaman oleh Korut. Ancaman Korut termasuk uji coba nuklir ke-6, provokasi melalui senjata strategis termasuk rudal

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 320.

jarak sedang dan jarak jauh, provokasi militer konvensional, dan provokasi asimetris seperti teror siber. Korsel juga sebaiknya membuat perjanjian tentang moratorium yang dapat menghentikan uji nuklir dan peluncuran rudal balistik Korut. Secara khusus, uji nuklir ke-6 peluncuran rudal jarak jauh akan membuat AS dan PBB meningkatkan sanksi dan tekanan, dan hal ini menyulitkan mereka untuk menginisiasi dialog. Oleh karena itu, penting untuk membuat Korut menyetujui moratorium uji coba nuklir ke-6 dan peluncuran rudal jarak jauh. Korsel dan AS perlu melakukan koordinasi kebijakan dalam bentuk penyediaan alat kebijakan responsif seperti pencabutan sanksi secara parsial dan menurunkan latihan militer bersama antara AS-Korsel.

Salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea adalah dengan berupaya mengubah Korea Utara. Dalam konteks ini, harus ada diskusi strategis antara Korsel dan AS mengenai cara untuk mempersiapkan arah perubahan dan mengawal perubahan dari Korut. Proses perubahan rezim Korut selama ini sangat kontroversial di lingkungan akademisi dan area kebijakan. Terdapat tiga aliran utama dalam perubahan rezim Korut : 1) tidak ada perubahan rezim Korut, 2) runtuhnya rezim Korut, dan 3) perubahan jangka menengah hingga panjang melalui peningkatan situasi HAM Korut dan meningkatnya arus informasi. Korut tidak memiliki sistem ekonomi dengan format tradisional terencana. Terdapat hubungan koeksistensi simbiotik antara negara dan pasar. Kemudian, teori rezim Korut yang tidak tergantikan menjadi tidak beralasan. Meski terdapat ekonomi pasar dan peningkatan keluhan mengenai ketimpangan sosial dari rakyat Korut, rezim Korut mampu memperkuat rezimnya melalui ideologi, politik, dan kontrol sosial. Oleh karena itu, asumsi bahwa rezim Korut akan runtuh dalam waktu dekat kurang meyakinkan.¹⁵

Oleh karena itu, memahami tren perubahan di bawah rezim Kim Jong-un merupakan hal krusial. Sebaiknya ada upaya baik jangka menengah maupun jangka panjang, untuk mendukung

ekspansi pasar Korut, mendorong Korut untuk membuka pintunya, dan mempromosikan reformasi. Selain itu, upaya bilateral dan multilateral harus dilakukan untuk meningkatkan situasi HAM Korut dan memperluas masuknya arus informasi.

Prospek Perdamaian dan Unifikasi di Semenanjung Korea

Dalam konteks proses unifikasi, salah satu isu kontroversial adalah menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan mewujudkan unifikasi. Mereka yang mendukung terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea menekankan peredaan ketegangan militer dan penyelesaian damai di Semenanjung Korea. Tujuan mereka untuk mewujudkan unifikasi secara *defacto* dapat terjadi melalui terciptanya perdamaian di semenanjung, koeksistensi damai, dan kerjasama. Sebaliknya, bagi mereka yang menginginkan tercapainya unifikasi terlebih dahulu menekankan pada fakta bahwa unifikasi adalah langkah fundamental untuk mengeliminir ketegangan militer di Semenanjung Korea dan menghilangkan ancaman nuklir Korut. Mereka mengklaim bahwa transisi di Semenanjung Korea ke arah rezim perdamaian merupakan sebuah mimpi jika dipertimbangkan dengan seluruh faktor yang terkait dengan terwujudnya rezim perdamaian di Semenanjung Korea, sikap keras Korut, dan kemungkinan pembatalan perjanjian oleh Korut. Tidak hanya itu, mereka juga berpendapat bahwa Korut menggunakan argumentasi menciptakan perdamaian untuk mencapai unifikasi Korea di bawah kepemimpinan Korut dan penarikan pasukan militer AS dari Korsel. Namun demikian, untuk mencapai unifikasi tidak bisa dipungkiri harus melalui proses yang tidak pasti sementara menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea merupakan isu yang harus segera diwujudkan.

Dalam hal ini, Korsel dan AS perlu membangun konsensus di mana isu harus ditangani terlebih dahulu. Satu hal yang ingin diwujudkan adalah membangun perdamaian di Semenanjung Korea dengan cara mengatasi isu nuklir Korut, membangun kepercayaan diri bersama di sektor militer antara dua Korea, mengimplementasikan pengawasan senjata, dan menciptakan rezim perdamaian di semenanjung.

¹⁵ JongChul Park, "The Prospects for US-DPRK Relations and US-ROK Coordination on the North Korean Policy", *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 31, No.2 (Fall/Winter 2017), hlm. 24.

Upaya penting lainnya adalah mempromosikan lingkungan yang nyaman bagi unifikasi damai dengan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Dalam konteks Pertemuan Tingkat Tinggi antara Kim Jong-un dan Moon Jae-in, kedua pemimpin Korea menandatangani perjanjian damai yang menegaskan bahwa kedua negara bersama-sama mewujudkan program denuklirisasi. Hal ini merupakan kemajuan penting dalam hubungan antar-Korea sejak gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea pada 1953. Kesempatan pertama yang riil bagi dialog antar-Korea sebenarnya muncul tatkala Korsel menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang pada Februari 2018. Dalam *event* olahraga internasional tersebut, dua Korea sepakat untuk melakukan pawai bersama pada upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin dibawah satu bendera unifikasi Korea. Selain itu, kedua negara sepakat menurunkan satu tim hoki wanita. Hal ini merupakan momen sejarah dimana untuk pertama kalinya dua negara Korea bersatu dalam satu tim olahraga di Olimpiade internasional.

Diantara analis Korea, muncul beberapa teori. Beberapa analis berargumen bahwa pemerintah Kim mulai membuka diri karena takut bahwa sanksi ekonomi akan menjadi ancaman berat bagi Korut. Sementara yang lain berpendapat bahwa program senjata rezim Korut saat ini dilengkapi dengan jaminan kuat bahwa program tersebut dapat mencegah ancaman serius. Teori ketiga berargumen bahwa pendekatan Presiden AS Donald Trump dalam dunia internasional yang tidak dapat diprediksi menjadikan Korut harus bersikap waspada.¹⁶ Namun yang perlu digarisbawahi, apapun stimulusnya, Korut mulai terlihat lebih diplomatis. Tatkala Pyongyang pertama kali menghubungi Seoul tentang kemungkinan pertemuan di Olimpiade Musim Dingin, saat itu belum jelas bagaimana sebuah Pertemuan Tingkat Tinggi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat. Pertemuan tersebut biasanya membutuhkan waktu perencanaan dan

negosiasi yang panjang, namun pada akhirnya kedua negara mampu melaksanakannya dengan persiapan hanya beberapa minggu.

Meskipun deklarasi Kim dan Moon berkomitmen untuk mewujudkan denuklirisasi, tidak jelas bagaimana kedua pihak memaknai denuklirisasi dalam pengertian yang sama. Apakah Pyongyang mau menerima program pengurangan kapabilitas militernya juga masih belum jelas, bahkan jika Korut mau terlibat dalam program denuklirisasi secara penuh, program persenjataannya tidak dapat diubah mengingat Korut sudah tahu bagaimana memproduksi senjata tersebut dan bahkan masih tahu bagaimana memproduksinya jika persenjataannya telah dimusnahkan.

Selain itu, dalam Deklarasi Panmunjom ditegaskan juga komitmen kedua pimpinan Korea untuk secara aktif melakukan pertemuan baik dengan AS maupun dengan AS dan Cina. Hal ini menunjukkan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap diskusi tentang hubungan antar-Korea tidak akan pernah bisa berlangsung secara bilateral. Meskipun Pertemuan Tingkat Tinggi Korea bernilai sejarah, isu mengenai pemisahan Korea tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan langsung AS dan Cina. Cina tidak akan menerima dipinggirkan oleh AS dan akan melakukan berbagai cara untuk menjamin bahwa langkah selanjutnya adalah melalui *four-way dialogue*. Hal yang sama, Korut akan membutuhkan dukungan dari partner ekonomi signifikannya jika ingin membangun kembali ekonominya.

Pada akhirnya, kepentingan Cina terwakili melalui koeksistensi damai antara dua Korea ketimbang reunifikasi, yang akan menjadi *buffer state* antara perbatasan Cina dengan sekutu militer AS. Oleh karena itu, Presiden Cina Xi Jin Ping akan terus mendukung Kim dan memberikan bantuan untuk pembangunan ekonomi ketimbang mendorong solusi formal masalah perbatasan Korut dengan Korsel. Sementara itu, kemajuan konkrit tidak dapat diraih tanpa kontribusi AS. Dalam hal ini, Korsel membutuhkan jaminan keamanan Washington dan beragam prioritas Korut berpusat pada menjaga diri dari kemungkinan aksi militer AS.

¹⁶ Ed Griffith, "A Korean Peace Process is Underway – but it still depends on the US and China, <https://theconversation.com/a-korean-peace-process-is-underway-but-it-still-depends-on-the-us-and-china-94327>, 27 April 2018, diakses pada 25 Juli 2018.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, meskipun Pertemuan Tingkat Tinggi antara dua pemimpin Korea bernilai sejarah, namun dalam kenyataannya, kedua pemimpin tidak memegang kunci bagi masa depan negara mereka. Namun, bukan hal yang bijak jika mengecilkan arti dari pertemuan tersebut. Bahwasanya dua pemimpin Korea berdialog merupakan kemajuan tersendiri dan jika ke depan mereka terus berdialog dan membangun rasa saling percaya merupakan hal terbaik yang dapat diharapkan hubungan antar-Korea.

Penutup

Terlepas dari banyaknya kalangan baik domestik maupun internasional yang meragukan dan mengkritisi implementasi dari Deklarasi Panmunjom, satu hal yang pasti adalah bahwa komitmen atau deklarasi tersebut sangat penting bagi dua Korea yang terpisah sejak Perang Korea 1950. Mengingat di tahun 2017, AS dan Korea Utara terlihat diambang perang di tengah perang kata-kata antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un serta uji nuklir Korea Utara dan gelar militer AS, nampaknya aksi simbolik dari Presiden Moon dan Kim telah membawa Semenanjung Korea ke arah yang lebih damai.

Meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007 sehingga memunculkan sikap skeptis akan implikasi Deklarasi Panmunjom bagi perdamaian Korea, namun yang perlu digarisbawahi adalah komitmen kedua negara untuk terus melakukan dialog merupakan hal yang harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian, meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan negara sekutu masing-masing pihak, yakni AS dan Cina. Dalam hal ini, bisa diungkapkan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea akan terwujud melalui kesepakatan antara empat pihak yakni Korea Selatan, Korea Utara, AS, dan Cina.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Brodie, Bernard. *The Anatomy of Deterrence as found in Strategy in the Missile Age*. Princeton: Princeton University Press. 1959.
- Kwak, Tae-Hwan & Seung-Ho Joo. "The Korean Peace Process: Problems and Prospects after the Summit". *World Affairs*. Vol. 165, No.2 (Fall 2002)..
- Kang, David C. "International Relations Theory and the Second Korean War" *International Studies Quarterly* Vol.47, No.3 (Sep. 2003).
- Moon, Chung-in dan Tae-Hwan Kim "Sustaining Inter-Korean Reconciliation: North-South Korea Cooperation" *The Journal of East Asian Affairs* Vol. 15, No.2 (Fall/Winter 2001).
- Park, JongChul "The Prospects for US-DPRK Relations and US-ROK Coordination on the North Korean Policy" *The Journal of East Asian Affairs* Vol. 31, No.2 (Fall/Winter 2017).

Sumber Internet

- Griffith, Ed. "A Korean Peace Process is Underway – but it still depends on the US and China, dalam <https://theconversation.com/a-korean-peace-process-is-underway-but-it-still-depends-on-the-us-and-china-94327>, 27 April 2018, diakses pada 25 Juli 2018.
- Nah, Liang Tuang, "How Much Do the Panmunjom Agreements Matter?", 30 April 2018, dalam <https://thediplomat.com/2018/04/how-much-do-the-panmunjom-agreements-matter>, diakses pada 20 Juli 2018.
- Panda, Ankit, "Seeing Through the Familiarity of the Inter-Korean Panmunjom Declaration", 7 Mei 2018, dalam <https://thediplomat.com/2018/05/seeing-through-the-familiarity-of-the-inter-korean-panmunjom-declaration/>, diakses pada 23 Mei 2018.

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

